

Dinamika Hubungan Indonesia-Australia: Studi Kasus Kepentingan Australia dalam Konflik Timor Timur

Rumdah¹, Eko Ribawati²

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 2288190011@untirta.ac.id

Received: 2022-10-28

Revised: 2023-05-25

Accepted: 2023-04-29

Published: 2023-04-30

Abstract

Judging from the historical aspect, Indonesia-Australia relations have a fairly strong amity and enmity side, with a more prominent aspect of enmity. Indonesia's relationship with Australia has had its ups and downs due to notable differences in terms of economic conditions, population, ethnicity, culture and religion. The interests between the two countries also often rub against each other, which also affects the harmony of relations between the two countries. Some cases mainly prevent the two countries from fighting for economic resources. From Operation Seroja onwards, Indonesian military forces were involved in the massacre of East Timorese civilians. The forms of violence committed are very diverse, from forced searches to the number of murder cases to attract international attention. In the 1998 referendum process, Australia was involved as a party involved. Australia in relation to East Timor (post-referendum East Timor) indirectly applied its hegemony to support Australia's political and economic interests. In the concept of regional security, Australia has a veiled political interest of making East Timor a buffer zone in addition to the economic interests of oil and gas resources in the Timor Pass. The article, written using qualitative methods, aims to provide an overview of the interests of Australia, Indonesia and East Timor in the conflict that occurred in the aftermath of the East Timor integration until after the 1998 referendum.

Keywords: *East Timor, Timor Gap, Indonesia-Australia Relations*

Abstrak

Dilihat dari aspek sejarah, hubungan Indonesia-Australia memiliki sisi amity dan enmity yang cukup kuat, dengan aspek enmity yang lebih menonjol. Hubungan Indonesia dengan Australia yang mengalami pasang surut karena perbedaan menonjol dalam hal kondisi ekonomi, jumlah penduduk, etnis, budaya, dan agama. Kepentingan diantara kedua negara juga kerap kali bergesekan sehingga turut mempengaruhi keharmonisan hubungan kedua negara tersebut. Beberapa kasus terutama menghadakan kedua negara untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. Sejak Operasi Seroja hingga seterusnya, pasukan militer Indonesia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil Timor Timur. Bentuk kekerasan yang dilakukan sangat beragam, dari penggeledahan paksa hingga banyaknya kasus pembunuhan hingga menarik perhatian dunia internasional. Dalam proses referendum 1998, Australia terlibat sebagai pihak yang terlibat. Australia dalam hubungannya dengan Timor Timur (Timor Leste pasca referendum) secara tidak langsung menerapkan hegemoninya untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi Australia. Dalam konsep keamanan kawasan, Australia memiliki kepentingan politik terselubung yaitu menjadikan Timor Leste sebagai buffer zone disamping kepentingan ekonomi atas sumber daya minyak dan gas di Celah Timor. Artikel yang ditulis menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepentingan Australia, Indonesia dan Timor Timur dalam konflik yang terjadi dalam runtutan peristiwa integrasi Timor Timur hingga pasca referendum 1998.

Kata kunci: *Timor Timur, Celah Timor, Hubungan Indonesia-Australia*

Pendahuluan

Kedaulatan suatu negara merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. (Joshua et al., 2006) Suatu negara tidak diperkenankan mencampuri kepentingan nasional atas negara lain dengan mempengaruhi politik internalnya atau bahkan turut mencampuri pengambilan keputusan oleh negara yang bersangkutan. Sikap suatu negara terhadap negara lain seharusnya saling menghormati kedaulatan yang dimiliki masing-masing negaranya, hal ini juga berkenaan dengan segi teritorial mengenai batas wilayah suatu negara. Batas wilayah sendiri menjadi prinsip penting atas pembagian wilayah pada masa penjajahan karena menyangkut kedaulatan yang diperoleh suatu negara.

Timor sejak ditemukan oleh bangsa Portugis di tahun 1526 memiliki banyak nama yang melekat, seperti Papua, nama yang diberikan oleh bangsa Portugis, New Guinea yang disebut oleh Belanda, dan menyatakan kepemilikan atas bagian barat pulau ini di tahun 1848. (Ribawati, 2022, hlm. 4). Sementara itu, Indonesia sendiri menyebut pulau ini sebagai Irian. Revolusi Bunga (*Red Flower's Revolution*) yang terjadi di Portugis pada 25 April 1974 menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap kebijakan politik kolonisasi Portugis di Afrika dan di Timor Timur. Pemerintah Revolusioner mengumumkan kebijakan hak penentuan nasib sendiri yang akan segera diberikan kepada wilayah jajahan Portugis (Poesponegoro, 2019, hlm. 627-628).

Kepentingan Australia di Timor Timur telah tertanam sejak Australia diduduki oleh Inggris dan membentuk koloni-koloni di Australia, seperti New South Wales dan Queensland. Adapun kepentingan tersebut terutama didorong oleh kepentingan ekonomi para pelaut yang bermukim di Australia. Secara propaganda, Letnan Yule dan Kapten Moresbay menyatakan daratan di sebelah timur wilayah Timor Timur itu sebagai milik Inggris di tahun 1846 dan 1873. Sedangkan wilayah Timor Timur sendiri merupakan bagian dari kolonialisme Belanda.

Pada tahun 1972 telah dicapai persetujuan Batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Australia di wilayah Laut Arafuru dan Laut Timor. Landas kontinen di sebelah selatan Timor Timur belum tercakup dalam persetujuan ini, karena Timor Timur pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Portugis. Oleh karena itu, batas landas kontinen tahun 1972 "terputus" di daerah sebelah Selatan Timor Timur, sehingga di daerah ini terdapat Celah yang dikenal sebagai "Celah Timor" atau "*Timor Gap*" (Indonesia, t.t.). Pasca perundingan kedua negara, diperkuat dengan pembentukan "*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia*" yang ditandatangani pada 11 Desember 1989, hubungan kedua negara tetap mengalami dinamika pasang surut terutama dengan dilaksanakannya jajak pendapat (referendum) Timor Timur di tahun 2002 (Fitriya Ningsih & Andalas, t.t., hlm. 18). Melalui pengkajian pustaka, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran kepentingan Australia, Indonesia dan Timor Timur dalam konflik yang terjadi dalam runtutan peristiwa inetgrasi Timor Timur hingga pasca referendum 1998.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah studi kualitatif deskriptif dengan objek studinya Australia, Indonesia dan Timor Timur dalam konflik yang terjadi dalam runtutan peristiwa inetgrasi Timor Timur hingga pasca referendum 1998. Penelitian lebih banyak menggunakan data kualitatif seperti nilai (*norm*), sikap, ideologi atau pemikiran orang yang diproses dengan

menghubungkan fenomena yang satu dengan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yakni dengan mencari sumber buku, jurnal ilmiah, serta sumber relevan lainnya sehingga memberikan gambaran yang utuh terkait kajian yang termuat dalam judul.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Hubungan Indonesia-Australia

Barry Buzan (1991) berpendapat bahwa keamanan pada dasarnya adalah suatu fenomena relasional (*relational phenomenon*). Oleh karena itu, keamanan suatu negara atau beberapa negara dalam suatu kawasan tidak dapat dipahami tanpa lebih dulu memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan, di antara negara-negara kawasan tersebut

Dilihat dari aspek sejarah, hubungan Indonesia-Australia memiliki sisi amity dan enmity yang cukup kuat, dengan aspek enmity yang lebih menonjol. Amity adalah hubungan antarnegara yang terjalin mulai dari rasa persahabatan sampai ekspektasi akan mendapatkan dukungan atau perlindungan satu sama lain. Sementara itu, Buzan menggambarkan enmity sebagai suatu hubungan antarnegara yang terjalin atas dasar kecurigaan dan rasa takut satu sama lain (Muti'ah Setyawati & Agussalim, t.t., hlm. 113–114). Pada sisi Indonesia, aspek amity terhadap Australia mulai tumbuh dan berkembang sejak Indonesia masih berjuang untuk kemerdekaan. Hubungan yang sangat akrab ditunjukkan oleh dukungan Australia kepada Indonesia dalam menghadapi Belanda. Pemerintah Australia, khususnya Partai Buruh, tidak mengizinkan kapal-kapal Belanda berlabuh di Australia. Richard Kirby juga bersedia menjadi mediator dalam konflik Indonesia-Belanda setelah Australia bergabung dalam Komisi Tiga Negara atau United Nations Special Commission on Indonesia (UNCI). Australia pun sangat berperan dalam membangun opini publik internasional, untuk ikut mendukung perjuangan Indonesia.

Jamie Mackie, dalam *Australia and Indonesia: Current Problems, Future Prospects* (2007) menggambarkan hubungan Indonesia dengan Australia yang mengalami pasang surut karena perbedaan menonjol dalam hal kondisi ekonomi, jumlah penduduk, etnis, budaya, dan agama. Kepentingan diantara kedua negara juga kerap kali bergesekan sehingga turut mempengaruhi keharmonisan hubungan kedua negara tersebut. Beberapa kasus terutama menghadakan kedua negara untuk memperebutkan sumber daya ekonomi yang berujung pada perjanjian perdamaian.

Meskipun sebelumnya Australia dan Indonesia telah melakukan kerjasama seperti Perjanjian Kerja Sama Keamanan atau *Agreement on Maintaining Security* (AMS) tahun 1994, akan tetapi perjanjian ini dibatalkan karena dukungan Australia terhadap Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia sehingga merenggangkan hubungan diplomatik Indonesia-Australia pasca referendum. Pasca pasukan Australia diterjunkan ke Timor Timur pada tahun 1998, Australia menerapkan politik luar negeri yang menghindari konflik militer dengan Indonesia (Muti'ah Setyawati & Agussalim, t.t., hlm. 115). Meskipun demikian, Indonesia-Australia pada masa selanjutnya tetap terlibat dalam hubungan bilateral, multilateral, dan global. Dinamika hubungan Indonesia-Australia terus mengalami pasang-surut dalam beberapa periode kepemimpinan presiden RI.

Konflik Timor Timur hingga Integrasi ke dalam NKRI

Pasca revolusi bunga di tahun 1974 serta kebijakan Portugal untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada koloni-koloninya, Timor Timur kemudian menggunakan hak

politik dekolonisasi dan memunculkan 3 partai politik, yaitu Partai UDT (*Uniao Democratica Timorese*), Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*), dan Apodeti (*Associacao Populer Democratica Timorese*) (Poesponegoro, 2019, hlm. 628). Ketiga partai juga memiliki pandangan erbeda tentang masa depan Timor Timur, dimana UDT ingin agar Timor Timur tetap menjadi negara bagian Timor Portugis, sedangkan partai Fretilin menginginkan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur. Berbeda dengan Apodeti yang menginginkan agar Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia (SNI Jilid 6, hal 628).

Dalam catatan sejarah, perhatian Indonesia terhadap Timor Timur mulai terlihat dalam upaya penanganan konflik internal di Timor Timur. Indonesia mengirimkan sejumlah pasukan TNI untuk melakukan operasi militer pada 7 Desember 1975 yang dikenal dengan Operasi Seroja (Yusuf Erwanda & Zulkarnain, t.t., hlm. 6). Adapun tujuannya sendiri adalah untuk meredakan pergolakan dan perang saudara yang berlarut-larut di Timor Timur. Operasi Seroja ini tidak serta merta dilakukan, akan tetapi atas pertimbangan semakin meluasnya pengaruh komunisme di partai Fretilin yang sebelumnya telah menyatakan kemerdekaan Timor Timur.

Pada 11 Agustus 1975 UDT dibawah pimpinan Fransisco Xavier Lopez da Cruz mengadakan kudeta yang bertujuan untuk memberantas paham komunis di Timor Portugis. Kudeta tersebut memunculkan reaksi dari pihak Fretilin, hingga kemudian menyebabkan terjadinya konflik (Douglas, 2015, hlm. 137). Konflik antara UDT dan Fretilin menyebabkan kekacauan hingga seluruh wilayah Timor Portugis dikuasai oleh pihak Fretilin. Timor Portugis menghadapi masa-masa sulit akibat dari konflik antara UDT dan Fretilin, selain itu sikap tidak peduli dari Pemerintah Portugis atas konflik ini, yang ditandai dengan hijrahnya Gubernur Portugis untuk Timor Portugis Dr. Lemos Pires menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Sebagian warga Timor Portugis mengungsi ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Nusa Tenggara untuk menghindari konflik (Suartika, 2015: 17).

Pasca penumpasan komunisme di Timor Timur, draft penting mengenai kasus konflik Timor Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tanggal 17 Juli 1976 (M. C., 2007, hlm. 599). Dalam Undang-Undang itu dimuat tentang Penyatuan Timor Timur secara de jure ke dalam bagian NKRI dan sekaligus pembentukan Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Selama integrasi yang terbentuk sejak 1976 ini, terjadi gesekan-gesekan diantara militer dengan penduduk Timor.

Pada dasarnya ciri khas pendudukan adalah kekerasan, yang datang dalam berbagai bentuk. Di wilayah Timor Timur puncak ketegangan antara oknum militer dan rakyat Timor Timur terjadi pada tahun 1991 dan mengundang perhatian dunia internasional, peristiwa tersebut dikenal dengan Insiden Santa Cruz.

Australia dan Kepentingannya dalam Referendum Timor Timur

Sejak Operasi Seroja hingga seterusnya, pasukan militer Indonesia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil Timor Timur. Bentuk kekerasan yang dilakukan sangat beragam, dari penggeledahan paksa hingga banyaknya kasus pembunuhan. Pada bulan Maret 1977, mantan konsul Australia James Dunn menerbitkan sebuah laporan yang merinci tuduhan bahwa sejak Desember 1975 pasukan Indonesia telah membunuh 50.000 dan 100.000 warga sipil di Timor Timur (Dunn, p.310, Notes on Timor). Dalam sebuah wawancara pada 5 April 1977 dengan The Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik mengatakan "jumlah korban tewas adalah 50.000 atau mungkin 80.000 orang" (Qutoed

in Turner: hal 207).

Australia dalam konflik antara pemerintah Indonesia di bawah presiden Soeharto dengan penduduk Timor Timur merupakan aktor sekunder yang berkedudukan sebagai pihak penengah (mediator) yang dalam prosesnya kemudian menjadi *securitizing actor* dalam konflik. Diawali dengan konflik Santa Cruz hingga keruntuhan Orde Baru di tahun 1998 yang membuka jalan bagi negosiasi internasional untuk dilaksanakannya referendum bagi warga Timor Timur. Dukungan yang diberikan Australia kepada Timor Timur terutama dukungan politik di PBB ketika terlaksananya referendum pada 30 Agustus 1999 hingga saat ini (Indrawan, t.t.).

Kepentingan Australia di Timor Timur jika ditinjau dari segi ekonomi berhubungan dengan kebutuhannya menemukan sumber energi baru yang menjanjikan. Sebagai negara tetangga, Australia memahami bahwa Timor Timur kaya akan sumber daya alam berupa gas alam, mineral dan minyak di wilayah perbatasan Australia-Timor Timur yang dikenal dengan nama Celah Timur. Dengan demikian Australia perlu menjalin hubungan baik dengan Timor Timur sehingga Australia terlibat dalam menangani konflik untuk selanjutnya menguasai Timor Timur pasca dilaksanakannya referendum 1999.

Akar sejarah mengenai Celah Timur yang kaya akan sumber daya alam ini dapat ditarik ketika Timor Timur masih berada di bawah kolonialisme Portugis. Pasca bersatunya Timor Timur ke wilayah NKRI di tahun 1976, maka permasalahan Celah Timur ini kemudian menjadi tanggungjawab Indonesia. Di tahun 1989 kemudian terciptalah Perjanjian Celah Timur yang berisi kesepakatan kerjasama bilateral terkait eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah maritim Timor Timur. Kemudian pasca Timor Timur lepas dari Indonesia di tahun 2002, maka kemudian dibuat perjanjian serupa (Shana Lia Mifroh, 2021: 167).

Selain untuk memperoleh Sumber Daya Alam yang menjanjikan, kehadiran Australia di Timor Timur berkaitan pula dengan kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasanya. Timor Timur yang terus memprotes Indonesia dan menuntut kemerdekaan dari Indonesia, secara tidak langsung akan memengaruhi stabilitas Australia selaku negara tetangga. Kehadiran militer Australia di wilayah Timor Timur pasca referendum tergabung dalam tentara multinasional yang disebut m Interfet (*International Force for East Timor*) sejak tahun 1999 sampai tahun 2000. Australia menjadi negara yang mengirimkan tentara terbanyak untuk menjaga perdamaian, mengatasi krisis, dan tugas kemanusiaan di Timor Timur.

Australia dalam hubungannya dengan Timor Timur (Timor Leste pasca referendum) secara tidak langsung menerapkan hegemoninya untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi Australia. Dalam konsep keamanan kawasan, Australia memiliki kepentingan politik terselubung yaitu menjadikan Timor Leste sebagai buffer zone disamping kepentingan ekonomi atas sumber daya minyak dan gas di Celah Timur.

Kesimpulan

Hubungan Indonesia dengan Australia yang mengalami pasang surut karena perbedaan menonjol dalam hal kondisi ekonomi, jumlah penduduk, etnis, budaya, dan agama. Kepentingan diantara kedua negara juga kerap kali bergesekan sehingga turut mempengaruhi keharmonisan hubungan kedua negara tersebut. Beberapa kasus terutama menghadakan kedua negara untuk memperebutkan sumber daya ekonomi yang berujung pada perjanjian perdamaian. Dalam catatan sejarah, perhatian Indonesia terhadap Timor Timur mulai terlihat dalam upaya penanganan konflik internal di Timor Timur. Indonesia mengirimkan sejumlah pasukan TNI untuk melakukan operasi militer pada 7 Desember 1975 yang dikenal dengan Operasi Seroja.

Adapun tujuannya sendiri adalah untuk meredakan pergolakan dan perang saudara yang berlarut-larut di Timor Timur. Kepentingan Australia di Timor Timur jika ditinjau dari segi ekonomi berhubungan dengan kebutuhannya menemukan sumber energi baru yang menjanjikan. Sebagai negara tetangga, Australia memahami bahwa Timor Timur kaya akan sumber daya alam berupa gas alam, mineral dan minyak di wilayah perbatasan Australia-Timor Timur yang dikenal dengan nama Celah Timur. Selain untuk memperoleh Sumber Daya Alam yang menjanjikan, kehadiran Australia di Timor Timur berkaitan pula dengan kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasannya.

Referensi

Douglas, K. (2015). *Three Centuries of Conflict in East Timor*. Rutgers University Press.

Indonesia. (t.t.). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. 19.

M. C., R. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (III)*. PT Serambi Ilmu Pustaka.

Poesponegoro, D. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.

Ribawati, E. (2022). *Australia dan Oceania dalam Sejarah*. Media Edukasi Indonesia.

Fitriya Ningsih, D. H., & Andalas, E. F. (t.t.). Social Dynamics Of Timor Timur Society During the Unification Era with Indonesia in Orang-Orang Oetimu"s By Felix K. Nesi. *Jurnal Kata*, 5(1), 10-23.

Indrawan, J. (t.t.). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia*, 11(2). <https://doi.org/10.26593/jihi.v11i2.1616.%25p>

Muti'ah Setyawati, S., & Agussalim, D. (t.t.). Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 111-124.

Yusuf Erwanda, B., & Zulkarnain. (t.t.). *Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dalam Operasi Seroja di Timor Timur Tahun 1975-1979*.